



Penerapan Blended Learning pada Pendidikan Politik di Organisasi Intra Sekolah dalam Menanamkan Sikap Tanggung Jawab Siswa SMA di Kabupaten Tuban

Dwi Wahyu Kartikasari¹, Hasanul Bulqiyah², Gufanta Hendryko Purba³, Amar Zaki⁴

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Ronggolawe, dwikartikaunirow@gmail.com

²Ilmu Politik, Universitas PGRI Ronggolawe, hasanulbulqiyah@gmail.com

³Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Darma Agung, gufantapurba011@gmail.com

⁴Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Abulyatama, ammarppkn@abulyatama.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 20 Agustus 2022

Disetujui: 30 September 2022

Kata Kunci:

Blended Leading
Pendidikan Politik
OSIS
Mananamkan
Sikap
Tanggungjawab

ABSTRAK

Abstrak: Partisipasi politik yang rendah terkadang menunjukkan kurangnya kepedulian atau keterlibatan warga dengan urusan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode blended learning pada pendidikan politik di Organisasi Intra sekolah dalam menanamkan sikap tanggung jawab bagi siswa SMA di kabupaten Tuban. Penelitian ini dlatarbelakangi oleh peranan pemilih pemula dalam pemilu yang sebagian besar dilakukan oleh anak usia SMA. Penanaman sikap tanggung jawab dalam penggunaan hak pilih mereka dalam memilih pemimpin terbaik menurut mereka maupun menanamkan sikap tanggung jawab dalam berorganisasi sebagai bekal mereka untuk terjun ke masyarakat di kemudian hari perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mencari data yang diperlukan. Dari hasil yang ditemukan di lapangan, ditemukan bahwa metode blended learning telah dilakukan di beberapa sekolah di kabupaten Tuban. Pendidikan politik dilakukan oleh semua lini, yakni dari segi teoritis oleh guru mata pelajaran PKn serta bimbingan dalam tanggung jawab berorganisasi yang dilakukan oleh pembina osis serta pembelajaran mandiri dari berbagai sumber yang dilakukan oleh siswa atau pengurus OSIS.

Abstract: Low political participation sometimes indicates a lack of concern or involvement of citizens with government affairs. The purpose of this study was to determine the application of blended learning methods in political education in intra-school organizations in instilling an attitude of responsibility for high school students in Tuban district. This research is motivated by the role of novice voters in elections which are mostly carried out by high school age children. Instilling an attitude of responsibility in the use of their voting rights in choosing the best leaders according to them and instilling an attitude of responsibility in organizing as a provision for them to enter society in the future needs to be done. This study uses a qualitative method with a case study approach to find the required data. From the results found in the field, it was found that the blended learning method had been carried out in several schools in the Tuban district. Political education is carried out by all lines, namely from a theoretical point of view by Civics subject teachers as well as guidance in organizational responsibilities carried out by student council supervisors as well as independent learning from various sources carried out by students or student council administrators.

A. LATAR BELAKANG

Indikator legitimasi rakyat untuk menjalankan kekuasaan negara (kedaulatan rakyat) sebesar-besarnya, yang ditunjukkan dengan partisipasinya dalam pesta demokrasi, termasuk partisipasi politik (Pemilu). Semakin besar tingkat keterlibatan politik, semakin dekat masyarakat mengikuti, memahami, dan berpartisipasi dalam urusan pemerintahan. Sebaliknya, partisipasi politik yang rendah terkadang menunjukkan kurangnya kepedulian atau keterlibatan warga dengan urusan pemerintahan. Sikap apatis kelompok kulit putih

(golput) dalam pemilu mencerminkan tingkat keterlibatan politik secara umum di antara penduduk. Sejauh mana warga negara mengambil bagian dalam proses politik melalui pemungutan suara dalam pemilu merupakan sinyal penting dan indikator seberapa jauh proses demokrasi suatu negara, serta sejauh mana rakyatnya mampu menjalankan kedaulatannya.

Usia legal untuk memilih adalah dimulai dari 17 tahun sesuai dengan syarat pemilih yang disampaikan oleh KPU, diantaranya adalah Warga Negara Indonesia, Warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun,

terdaftar sebagai pemilih di DPT, Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, Seorang purnawirawan TNI. Berdasarkan persyaratan tersebut, maka salah satu hak memilih adalah didapatkan oleh remaja usia 17 tahun. Dimana dalam usia tersebut berarti seorang remaja dapat dikatakan sebagai pemilih pemula karena mereka dapat kesempatan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Dalam segi pendidikan, di sekolah juga telah diajarkan mengenai konsep politik yang diberikan oleh guru kepada siswa.

Kajian sebelumnya dalam pendidikan politik di sekolah diantaranya, Rohma dkk[1] bahwa praktik pendidikan demokrasi di sekolah dalam membentuk warga negara yang demokratis dapat dilakukan melalui proses pembelajaran dan kegiatan sekolah, lainnya meneliti tentang bentuk-bentuk pendidikan politik pada pemilih pemula, dan dampak pendidikan politik pada pemilih pemula [2], pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dan hukum di kalangan remaja[3], pendidikan politik dapat dilakukan dengan menerapkan kajian keagamaan, pendidikan politik pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik pada kegiatan ekstrakurikuler[4], pendidikan kewarganegaraan sebagai pengembangan kompetensi warga Negara pada pendidikan politik siswa [5].

Pendidikan politik melalui blended learning merupakan metode baru yang digunakan yang menggabungkan konvensional dengan online. Blended berarti campuran atau kombinasi dan learning berarti pembelajaran atau pelatihan. Jadi Blended learning adalah perpaduan atau kombinasi dari berbagai pembelajaran baik online maupun offline (pembagian file dan tatap muka)[6]. Pengembangan media pembelajaran yang berbasis digital yang memudahkan siswa untuk belajar mandiri sehingga menghasilkan pembelajaran online atau Pembelajaran offline [7]. Dalam kata lain bahwa pembelajaran dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik secara kelompok maupun mandiri melalui teknologi informasi dan komunikasi. Suatu pembelajaran mampu dilakukan oleh peserta didik secara mandiri melalui media sosial maupun media masa, hal tersebut berlaku juga untuk pendidikan politik. Peranan pendidik dan media serta peranan lingkungan sangat mempengaruhi pemahaman politik siswa. Dalam pemahaman politik, siswa di era sekarang sangat terbantu dengan media masa online dan media sosial untuk menambah pengetahuannya.

Pembelajaran online hanya meningkatkan wawasan dan pengetahuan saja, sehingga masih memerlukan kegiatan tatap muka yang sesungguhnya (offline) jika ingin mendapatkan peningkatan keterampilan dan sikap. Dalam pendidikan politik di sekolah, selain melalui pemaparan konsep oleh guru, secara praktik juga dapat

terlihat dari partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS[6]. Karakteristik blended learning yang paling umum dikutip oleh Egbert & Hanson Smith dalam Nurhadi[6] menyatakan: (1) Peserta didik memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara sosial dan bernegosiasi. (2) Peserta didik memiliki cukup waktu dan umpan balik. (3) Peserta didik dibimbing untuk menghadiri proses pembelajaran dengan penuh perhatian. (4) Peserta didik bekerja dalam suasana yang ideal yaitu tingkat stres / kecemasan yang rendah. Hal tersebut karena adanya variasi dalam belajar sehingga peserta didik tidak bosan serta memiliki kesempatan untuk eksplorasi materi dari berbagai sumber.

Isu-isu di bidang politik antara lain: (1) keengganan atau ketidakpedulian mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak nyaman berdiskusi atau belajar tentang politik. Beberapa siswa tidak memilih karena beberapa alasan: (1) mereka tidak cukup tahu tentang pemilu atau politik untuk membuat keputusan yang tepat; (2) sebagian mahasiswa senang mengikuti kegiatan politik, namun sikap fanatiknya terhadap salah satu pilihan politiknya seringkali menimbulkan konflik dan menyebarkan ujaran kebencian dengan calon yang bukan pilihannya; (3) sebagian mahasiswa menggunakan hak pilihnya berdasarkan politik uang; (4) beberapa siswa tidak cukup tahu tentang pemilu atau politik untuk membuat keputusan yang tepat[8]. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan, kesadaran, sikap, afiliasi politik, dan keterlibatan dalam proses politik, serta keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk membuat penilaian politik yang tepat[9].

Dalam pembelajaran politik di sekolah, Organisasi Intra Sekolah atau biasa disebut OSIS merupakan suatu wadah dalam melatih etika berpolitik bagi para siswa. Organisasi Intra Sekolah dibentuk salah satunya adalah untuk menjadi model politik masyarakat. Di dalam pengurusan OSIS, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada siswa untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, berkampanye, tata cara memilih ketua OSIS, pengorganisasian dan pembagian tanggung jawab, tugas serta wewenang dalam kepengurusan, dsb. Hal tersebut membantu untuk mencetak karakter siswa dalam tata cara berpolitik yang baik serta tugas guru adalah membimbing siswa dan mengarahkan agar sesuai dengan kaidah dan etika berorganisasi serta berpolitik. Karakter yang perlu ditingkatkan dalam melatih perpolitikan pada diri peserta didik untuk bekal kedepannya adalah sikap tanggung jawab atas pilihan, keputusan maupun atas posisi dan tanggung jawab organisasi yang mereka lakukan. Dengan demikian tujuan dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan penerapan metode blended learning pada pendidikan politik di Organisasi Intra sekolah dalam menanamkan

sikap tanggung jawab bagi siswa SMA di kabupaten Tuban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana menurut Lincoln dan Guba dalam *Naturalistic Inquiry* secara epistemologis, penelitian kualitatif didasarkan pada nilai dan judgment nilai, bukan fakta[10]. Dalam pandangan umum di lapangan mereka mengklaim bahwa nilai peneliti memandu dan membentuk simpulan penelitian sebab peneliti membangun realitas dari penelitian. Dalam waktu yang sama peneliti memiliki sensitivitas pada realitas yang diciptakan oleh orang lain yang terlibat, dan konsekuensi perubahannya dan perbedaan-perbedaan nilai. Selain itu, Creswell[11] memaparkan bahwa penelitian kualitatif terdiri dari asumsi filosofis, strategi, metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data yang lebih beragam dibandingkan penelitian kuantitatif. Pemaparan Creswell mengenai penelitian kualitatif, yakni merupakan bentuk penelitian yang berisi pengumpulan data yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan serta mampu untuk diinterpretasikan.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus (case study). Yakni suatu strategi yang lebih cocok apabila menggunakan pertanyaan berdasarkan bagaimana dan mengapa, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan saat penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus juga dibedakan menjadi tiga tipe yakni studi-studi kasus eksplanatoris, eksploratoris, dan deskriptif[12]. Pernyataan tersebut ditegaskan dengan definisi studi kasus dalam [13] yakni suatu penelitian dalam penelitian kualitatif, yang diawali dengan terjadinya suatu peristiwa yaitu kejadian dalam masyarakat, sangat menarik perhatian, karena memuat misteri dan menuntut segera untuk dianggap untuk memperoleh kebenaran dibalik peristiwa tersebut.

Metode kualitatif dan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai pengaplikasian metode blended learning dalam menanamkan sikap tanggung jawab peserta didik yang tergabung dalam organisasi intra sekolah maupun yang tidak. Metode kualitatif dipilih karena diharapkan dapat memperoleh informasi secara mendalam terkait kejadian atau keadaan yang terjadi secara nyata di suatu lingkungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Blended Learning Dalam Pendidikan Politik

Blended learning dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan siswa karena dapat membuat siswa belajar secara mandiri. Indikator dari kemandirian siswa adalah

sikap bertanggung jawab terhadap tugas dalam pembelajaran[14]. Dalam pemaparan hidayat, metode blended learning dimaknai sebagai metode belajar yang mampu menumbuhkan kemandirian serta tanggung jawab siswa. Metode blended learning menggabungkan antara pembelajaran tatap muka, serta pembelajaran berbasis Online. Pada awal pandemi covid-19 hingga era new normal, pembelajaran dengan metode blended learning sangat sering dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan belajar dalam protokol kesehatan. Pembelajaran atau pelatihan blended learning mengkombinasikan antara pembelajaran face to face (tatap muka) dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi yang mempunyai kelebihan antara lain [6]: 1) Peserta didik berinteraksi langsung dengan isi dari pembelajaran.; 2) Dapat berinteraksi dengan teman; 3) Berdiskusi kelompok dan bertukar pendapat; 4) Mengakses e-library, kelas virtual; 5) Penilaian online; 6) E-tuitions; 7) Mengakses dan memelihara blog pembelajaran; 8) Seminar online (webinars); 9) Melihat dosen ahli di youtube; 10) Belajar online melalui video dan audio; 11) Laboratorium virtual. Dalam pendidikan politik di SMA di Kabupaten Tuban, beberapa Sekolah menengah antara lain SMA N 1 Tuban, SMK N 1 Tuban, SMK N 3 Tuban, SMA N 4 Tuban, hingga sekolah menengah yang berbasis agama, yakni MA N 1 Tuban, telah mengkombinasikan pembelajaran secara offline dan online. Seperti yang diterangkan oleh Lalima dalam Nurhadi, bahwa kelebihan dari blended learning adalah dengan adanya pembelajaran melalui video terkait isu politik dari media sosial dan menganalisis mengenai bagaimana perpolitikan yang seharusnya dilakukan dan sesuai etika. Meskipun dalam prakteknya, pendidikan politik mengalami keterbatasan dalam pengaplikasiannya. *"The frontiers of software are unstable and changing constantly. Each year hundreds of programs are written for political education"*[15]. Keterbatasan dari software yang kurang stabil dan dapat berubah sewaktu-waktu, menurut Radicular juga termasuk dalam suatu keterbatasan pendidikan politik berbasis media teknologi. Hal tersebut menjadikan peranan tenaga pendidik secara nyata masih diperlukan untuk membentengi peserta didik dalam belajar yang tidak terarah.

Prosentase pembelajaran blended learning tidak serta merta selalu dilaksanakan dengan perbandingan 50:50. Ada bermacam-macam komposisi dalam pelaksanaan blended learning, ada yang memakai prosentase 50:50 artinya 50% online dan 50 % tatap muka. Ada pula yang menggunakan prosentase 70:30, artinya 70% online dan 30% tatap muka. Penentuan prosentase tersebut adalah sangat tergantung dari tingkat penguasaan keterampilan yang diharapkan, mudah tidaknya ketersediaan alat-alat dan kelengkapan yang dibutuhkan dan tingkat penguasaan awal para peserta didik[6]. Di kabupaten Tuban sendiri, pembelajaran dalam berpolitik dapat melalui interaksi

langsung dari guru dan murid, serta didukung dengan media komunikasi yang telah terjangkau dan mudah diakses. Namun, karena pandemi covid-19 yang tidak terlalu tinggi dan pembatasan tatap muka juga tidak 100% dilarang, maka metode blended learning mampu dilakukan dengan kisaran 70% tatap muka dan 30% online seperti melalui zoom meeting, google classroom dan lain sebagainya.

Blended learning mempunyai 3 komponen pembelajaran yang dicampur menjadi satu bentuk pembelajaran belnded learning. Komponen-komponen itu terdiri dari 1) online learning, 2) pembelajaran tatap muka, dan 3) belajar mandiri[16]. Dalam hal ini, siswa SMA di kabupaten Tuban mampu belajar mandiri melalui media sosial seperti instagram, youtube dan media massa lainnya. Selain itu, belajar mandiri dapat diperoleh melalui pengamatan lingkungan sekitar dan masyarakat. Peserta didik mampu menelaah pergerakan politik pada masa kampanye, maupun pemilu. Meskipun pada anak SMA dengan rentang usia dibawah 17 tahun belum memiliki hak memilih.

“...the task of producing, in a rational way, a programme of political education cannot be undertaken in the absence of considerable theoretical work on the nature of knowledge and of politics”[17]. Pernyataan tersebut mendukung tentang pentingnya suatu pendidikan politik terlebih jika dikaitkan dalam moralitas dan kehidupan sehari-hari.

2. Organisasi Intra Sekolah Sebagai Laboratorium Pendidikan Politik di Sekolah

Pendidikan politik di beberapa SMA di kabupaten Tuban dilakukan dalam beberapa metode. SMA di kabupaten Tuban menjadi suatu sarana edukasi yang netral terkait perpolitikan, sehingga tidak mengizinkan siswanya yang telah cukup umur untuk melakukan dan mengikuti suatu kelompok politik tertentu. Untuk pendidikan politik secara teoritis lebih banyak diberikan oleh guru PKn di dalam kelas. Seperti yang dijabarkan oleh Soemantri bahwa dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah berinti pada demokrasi pendidikan yang mempersiapkan siswa agar dapat hidup sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945[18]. Pendidikan Kewarganegaraan dengan bahasan politik tersebut bahkan dimulai dari kelas X (sepuluh) yang diajarkan mengenai sejarah perpolitikan di Indonesia, serta siswa kelas X diajarkan untuk mengikuti pemilihan ketua OSIS. Para pemilih pemula sebagian besar kurang memahami aturan dalam pemilu, maka mereka perlu untuk mengetahui dan memahami berbagai hal yang berkaitan dengan dengan pemilu, contohnya: (1) alasan penyelenggaraan pemilu; (2) tahapan dalam pelaksanaan pemilu; (3) siapa saja aktor yang boleh ikut serta dan terlibat dalam pemilu; dan (4) hingga terkait

hal bagaimana tata cara pemilih pemula menggunakan hak pilih dalam pemilu[19]. Hal tersebut dapat mereka pelajari dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah.

Proses pemilihan ketua OSIS merupakan suatu bentuk praktek pemilu dalam ranah kecil. Sekolah menjadi suatu miniatur laboratorium masyarakat dalam perpolitikan, sehingga siswa kelas X turut dilibatkan untuk memilih maupun masuk ke dalam organisasi intra sekolah. Selanjutnya, pada tahap kelas yang lebih tinggi, yakni kelas XI, siswa tidak hanya diberikan kesempatan untuk memilih ketua OSIS, namun juga diberikan kesempatan dalam mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan sekolah. Siswa diajari bagaimana cara untuk berkampanye, mencari dukungan serta menjadi pemimpin yang baik jika nanti mereka terpilih menjadi ketua OSIS. Hal tersebut ditujukan untuk membentuk peserta didik yang melek politik. Aspek yang membentuk melek politik paling

tidak berkenaan dengan sikap tentang kebebasan, toleransi, fair, menghargai kebenaran, menghargai pemikiran, dan aspek lain, yang biasa disebut nilai prosedural [20].



Gambar 1: UEJ leading activities and practices: Political education as foundation

Sekolah sebagai model pembelajaran pertama dan pondasi utama mengenai perpolitikan yang beretika, didukung oleh pernyataan Zavala & Henning yang menyebutkan bahwa *“school and community contexts, where outside of school factors such as transportation, poverty, and housing are most directly connected to what happens inside of the school”*[21]. Yakni suatu sekolah mengakomodir kegiatan komunitas, pendidikan politik dan partisipasi secara aktif. Dimana, dalam hal tersebut organisasi intra sekolah merupakan suatu laboratorium sederhana bagi siswa untuk belajar sebelum mereka benar-benar mengikuti perpolitikan di masyarakat ketika mereka dewasa nanti.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan blended learning dalam pendidikan politik di SMA kabupaten Tuban telah dilaksanakan di seluruh SMA kabupaten Tuban sebagai pondasi politik siswa yang sebagian besar masih awam mengenai kehidupan politik. Metode blended learning mencakup model pembelajaran dari sistem offline serta online dan belajar secara mandiri. Secara offline, Guru memiliki peranan penting dalam transfer ilmu, sedangkan basis online dapat sangat terlihat terlebih ketika keadaan pandemi, dimana siswa dan guru belajar melalui zoom meeting, google classroom, dsb. Sedangkan belajar mandiri dapat dilakukan dari praktik organisasi intra sekolah dalam pemilihan ketua OSIS. Kegiatan belajar politik di bangku sekolah lebih ditekankan sebagai pondasi perpolitikan yang berlandaskan moralitas dan etika. Sehingga, lembaga terkait yakni lembaga pendidikan, sekolah maupun masyarakat harus lebih dapat memanfaatkan kemajuan teknologi bagi pembelajaran peserta didik dalam ranah politik yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait, diantaranya adalah Kepala sekolah dan guru PKN serta pembina dan pengurus OSIS dari: SMA Negeri 1 Tuban, SMA Negeri 4 Tuban, SMK Negeri 1 Tuban, SMK Negeri 3 Tuban, dan dari MA Negeri 1 Tuban, serta ketua KPU Kabupaten Tuban yang telah memberikan informasi terkait penelitian kami dan telah meluangkan waktunya untuk penulisan jurnal ini.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] A. N. Rohmah and M. M. K. Sari, "Praktik Pendidikan Demokrasi di SMAN 4 Bojonegoro Dalam Membentuk Warga Negara Yang Demokratis," *Kaji. Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 2, 2018.
- [2] A. Pattipeilohy, N. Yusuf, and T. Handayani, "Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di SMAN 1 Balauring Lembata NTT," *J. Civ. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 128–137, 2018.
- [3] A. Haryanti, "Peran dan Sikap Guru dalam Mensosialisasikan Pendidikan Politik di Sekolah," *PEKOBIS J. Pendidikan, Ekon. dan Bisnis*, vol. 1, no. 1, pp. 70–85, 2016.
- [4] R. A. Mutia, W. Widayanti, and P. Astuti, "Peran Sekolah dalam Pendidikan Politik Bagi Siswa di Sekolah Menengah Atas Islam Hidayatullah Semarang," *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 4, no. 1, pp. 16–25, 2014.
- [5] I. Efendi, "Pendidikan Kewarganegaraan: Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara Dalam Pengenalan Partisipasi Politik Siswa Sekolah Dasar," *Didakt. TAUHIDI J. Pendidik. Guru Sekol. Dasar*, vol. 7, no. 2, pp. 149–162, 2020.
- [6] N. Nurhadi, "Blended Learning dan Aplikasinya di Era New Normal Pandemi Covid 19," *AGRIEKSTENSIA J. Penelit. Terap. Bid. Pertan.*, vol. 19, no. 2, pp. 120–128, 2020.
- [7] W. Abdullah, "Model blended learning dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran," *Fikrotuna*, vol. 7, no. 1, pp. 855–866, 2018.
- [8] I. Malik, N. Khaerah, A. L. Prianto, and H. Hamrun, "Edukasi politik virtual era demokrasi digital pada sekolah menengah kejuruan," *Masy. Berdaya dan Inov.*, vol. 1, no. 1, pp. 39–47, 2020.
- [9] U. S. Winataputra and D. Budimansyah, "Civic Education: konteks, landasan, bahan ajar dan kultur kelas," *Bandung Prodi PKN SPS UPI*, 2007.
- [10] Y. S. Lincoln and E. G. Guba, *Naturalistic inquiry*. sage, 1985.
- [11] R. Cresswell and P. Croaker, "The practical application of polyhedral finite volume methodology to problems with large scale discrepancies," in *Computational Fluid Dynamics 2002*, Springer, 2003, pp. 783–784.
- [12] B. Yin and W. A. Curtin, "First-principles-based prediction of yield strength in the RhIrPdPtNiCu high-entropy alloy," *npj Comput. Mater.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–7, 2019.
- [13] M. Affandi, "Ilmu-ilmu Kenegaran: Suatu Perbandingan," *Bandung Univ. Padjadjaran*, 1982.
- [14] M. T. Hidayat, T. Junaidi, and M. Yakob, "Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Tradisi Lisan Aceh," *Mimb. Ilmu*, vol. 25, no. 3, pp. 401–410, 2020.
- [15] M. Soliday, *The politics of remediation: Institutional and student needs in higher education*. University of Pittsburgh Pre, 2002.
- [16] S. Istiningsih and H. Hasbullah, "Blended learning, trend strategi pembelajaran masa depan," *J. Elem.*, vol. 1, no. 1, pp. 49–56, 2015.
- [17] D. B. Heater, "Political ideas in the modern world," 1971.
- [18] M. N. Somantri, "Menggagas pembaharuan pendidikan IPS," *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2001.
- [19] V. Hajad and I. Ikhsan, "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di SMAN 1 Meureubo Kabupaten Aceh Barat," *J. Pengabd. Masy. Darma Bakti Teuku Umar*, vol. 1, no. 1, pp. 19–27, 2019.
- [20] E. Nurdiansyah, "INDONESIA," pp. 54–58.
- [21] M. Zavala and N. Henning, "The role of political education in the formation of teachers as community organizers: Lessons from a grassroots activist organization," *Urban Educ.*, vol. 56, no. 7, pp. 1137–1163, 2021.